



PENGELOLAAN BUMDES “CIJEUNGJING BERDIKARI” SEBAGAI PENGGERAK PEREKONOMIAN DESA

Pipih Sopiah

Universitas Galuh Ciamis

Sirodjul Munir

Universitas Galuh Ciamis

Neti Sunarti

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh Ciamis

Korespondensi penulis: sopiocta281@gmail.com

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 'Cijeungjing Berdikari' sebagai penggerak perekonomian Desa Cijeungjing, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berfokus pada penerapan fungsi manajemen menurut George R. Terry yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes “Cijeungjing Berdikari” telah memiliki dasar kelembagaan yang cukup baik, namun pelaksanaannya masih menemui kendala seperti minimnya sumber daya manusia, tidak adanya SOP dan job description secara tertulis serta kurangnya inovasi pengembangan usaha. Untuk mewujudkan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa yang optimal, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, penguatan pengawasan, dan dukungan permodalan yang memadai.

Kata Kunci : BUMDes, Manajemen, Pengelolaan, Ekonomi Desa, POAC

Abstract This study aims to analyze the management of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) 'Cijeungjing Berdikari' as a driver of the economy of Cijeungjing Village, Cijeungjing District, Ciamis Regency. Using a descriptive qualitative approach, this study focuses on the implementation of management functions according to George R. Terry which include planning, organizing, implementing, and monitoring. The results of the study indicate that BUMDes "Cijeungjing Berdikari" has a fairly good institutional basis, but its implementation still encounters obstacles such as minimal human resources, the absence of SOPs and written job descriptions and a lack of business development innovation. To realize BUMDes as an optimal driver of the village economy, it is necessary to increase human resource capacity, strengthen supervision, and adequate capital support.

Keywords: BUMDes, Management, Administration, Village Economy, POAC

Pendahuluan

Desa merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan suatu negara, terutama di Indonesia yang memiliki ribuan desa dengan karakteristik dan potensi yang beragam. Pemerintah telah memberikan perhatian khusus dalam pengembangan desa melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu entitas usaha yang dijalankan oleh warga dan pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi desa, dan didirikan sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang ada di desa. Operasional BUMDes dilakukan dengan mengumpulkan aktivitas ekonomi dari masyarakat ke dalam

Received Oktober 20, 2025; Revised November 30, 2025; Desember 01, 2025

** Pipih Sopiah, sopiocta281@gmail.com*

suatu wadah yang terorganisir atau badan usaha yang dikelola secara profesional, sambil tetap mengandalkan potensi asli yang dimiliki desa. Hal ini bisa membuat usaha yang dijalankan oleh masyarakat menjadi lebih efisien dan produktif.

Pembangunan desa merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Dalam rangka memperkuat ekonomi desa, pemerintah menginisiasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes didirikan untuk memanfaatkan potensi lokal desa melalui pengelolaan usaha secara kolektif oleh masyarakat dan pemerintah desa.

BUMDes “Cijeungjing Berdikari” hadir sebagai bentuk nyata dari kebijakan tersebut, dengan harapan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Desa Cijeungjing. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti lemahnya manajemen, keterbatasan SDM, dan kurangnya inovasi usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes “Cijeungjing Berdikari” dengan menggunakan pendekatan fungsi manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) sebagai instrumen analisis.

Tinjauan Pustaka

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur.

Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut George R. Terry, fungsi manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat fungsi ini harus berjalan secara sinergis agar tujuan organisasi tercapai.

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang didirikan oleh desa dan dikelola secara kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola potensi ekonomi desa.

Tujuan utama BUMDes adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pelaksanaan BUMDes diatur dalam Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Hal ini dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Menurut Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015, BUMDes adalah “Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Penelitian oleh Rahmawati dkk (2020) menunjukkan pentingnya manajemen profesional dalam pengelolaan BUMDes. Kartika dkk (2017) menekankan transparansi pengelolaan dana, sementara Pakamundi (2022) mengaitkan manajemen dengan efektivitas pembangunan desa. Semua penelitian ini mengindikasikan bahwa manajemen yang baik adalah kunci keberhasilan BUMDes.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Informan terdiri dari Kepala Desa, Ketua BUMDes, Sekretaris, Bendahara, pengelola unit usaha, dan masyarakat setempat.

Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Cijeungjing Berdikari merupakan salah satu instrument penting dalam pembangunan ekonomi di tingkat Desa Cijeungjing Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Lahir dari amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, BUMDes Cijeungjing Berdikari diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat desa dalam mengelola potensi lokal secara kolektif, berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan warga.

Secara umum BUMDes Cijeungjing Berdikari berperan sebagai motor penggerak perekonomian desa melalui pengelolaan unit-unit usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal. BUMDes diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) dan mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat desa.

BUMDes bukan hanya sebatas badan usaha, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa. Melalui peran strategisnya, BUMDes dapat membantu mengurangi ketergantungan desa terhadap pihak luar, mengoptimalkan pemanfaatan potensi desa, serta menciptakan siklus ekonomi lokal yang sehat dan mandiri. Dengan demikian, keberadaan BUMDes menjadi bukti nyata bahwa desa mampu menjadi subjek utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Agar BUMDes dapat berfungsi optimal sebagai penggerak ekonomi desa, diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah desa berperan penting dalam memberikan kebijakan yang kondusif, menyediakan modal awal dan melakukan pengawasan berkala. Pemerintah daerah dan pusat juga dituntut memberikan pelatihan, akses permodalan lanjutan serta fasilitasi kemitraan dengan sektor swasta.

Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan BUMDes. Diantaranya adalah rendahnya kapasitas manajerial pengurus, kurangnya inovasi usaha, lemahnya sistem pelaporan keuangan serta minimnya partisipasi aktif masyarakat. Tak jarang pula BUMDes terbentuk hanya untuk memenuhi syarat administrative tanpa perencanaan usaha yang matang. Masalah transparansi juga kerap menjadi titik lemah yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BUMDes.

Penguatan BUMDes memerlukan pendekatan sistematis dan berkelanjutan. Strategi yang dapat diterapkan antara lain :

- a. Perencanaan usaha yang partisipatif dan berbasis potensi desa melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat luas
- b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan manajemen usaha
- c. Digitalisasi pengelolaan BUMDes, seperti penggunaan sistem akuntansi sederhana

- berbasis aplikasi dan sistem informasi manajemen
- d. Kemitraan strategis dengan pihak ketiga
 - e. Evaluasi dan pengawasan berkala oleh pemerintah desa dan lembaga desa agar jalannya usaha tetap dalam prinsip transparansi, akuntabilitas dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan hasil dari wawancara dengan informan tersebut mengenai bagaimana Pengelolaan BUMDes Cijeungjing Berdikari di Desa Cijeungjing Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Hasil wawancara tersebut akan penulis uraikan sesuai dengan operasionalisasi konsep mengenai konsep dasar fungsi manajemen sebagaimana diungkapkan oleh GR.Terry dalam (Abd.Rohman 2017:20) meliputi 4 (empat) fungsi dasar yaitu: Perencanaan; Pengorganisasian; Pelaksanaan; dan Pengawasan. Untuk penjelasan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut.

BUMDes 'Cijeungjing Berdikari' memiliki unit usaha seperti sewa alat berat, budidaya lele, dan pengadaan pakan ikan. Namun belum ada pengembangan usaha baru sejak 2024.

Perencanaan: BUMDes telah menyusun visi dan misi serta AD/ART. Namun, pelibatan masyarakat dalam perencanaan belum optimal. Rencana usaha belum disesuaikan dengan tren pasar atau kebutuhan lokal yang berkembang.

Pengorganisasian: Struktur organisasi sudah ada namun masih sederhana dan tidak semua posisi strategis terisi. Koordinasi antar pengelola kurang berjalan efektif.

Pelaksanaan: Pelaksanaan usaha telah berjalan namun partisipasi masyarakat dan motivasi anggota masih rendah. Minimnya pelatihan juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kinerja pengelola.

Pengawasan: Laporan keuangan sudah disusun secara berkala dan dilaporkan secara berkala kepada pemerintah desa sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi. Pengawasan dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes Cijengjing Berdikari sebagai penggerak perekonomian desa dengan menggunakan pendekatan teori manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling), belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) dimensi yaitu Pengorganisasian (*Organizing*) dan Pelaksanaan (*Actuating*).

Adapun hambatan yang ditemukan dalam Pengelolaan BUMDes Cijeungjing Berdikari sebagai penggerak perekonomian di Desa Cijeungjing Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yaitu, pembagian tugas belum berjalan secara maksimal, ketiadaan SOP yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak konsisten, kurangnya peatihan bagi pengurus BUMDes dan rendahnya inovasi dalam penembangan usaha dikarenakan tidak

adanya kemitraan/kerjasama dengan pihak ke-3 yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan secara optimal.

Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan BUMDes Cijeungjing Berdikari sebagai penggerak perekonomian di Desa Cijeungjing Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis agar berjalan optimal, yaitu BUMDes Cijeungjing Berdikari harus membuat struktur organisasi dan pembagian yang jelas dengan uraian tugas (*job description*) yang terperinci, pengurus BUMDes juga diharapkan harus sering mengikuti pelatihan rutin terkait manajemen usaha, keuangan, pemasaran dan teknologi digital. Dan pelatihan ini bukan hanya terbatas untuk beberapa pengurus saja melainkan untuk semua pengurus. Selain itu juga BUMDes Cijeungjing Berdikari harus membangun kerjasama dengan berbagai pihak seperti, pelaku usaha lokal, koperasi, UMKM dan pihak swasta serta jalin kemitraan dengan pemerintah, lembaga keuangan mikro dan investor untuk akses modal dan pembinaan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan BUMDes Cijeungjing Berdikari sebagai penggerak perekonomian di Desa Cijeungjing Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pengelolaan BUMDes agar pengelolannya berjalan secara optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan :

1. Sebaiknya BUMDes Cijeungjing Berdikari melakukan penguatan struktur dan pembagian tugas. Karena penguatan struktur organisasi BUMDes merupakan langkah fundamental dalam menciptakan tata kelola yang efektif dan akuntabel. Struktur organisasi yang jelas akan mempermudah koordinasi antar bagian serta menghindari terjadinya tumpang tindih tugas dan kewenangan. Setiap posisi harus dilengkapi dengan uraian tugas (*job description*) yang spesifik dan selaras dengan tujuan strategi BUMDes.
2. Sebaiknya diadakan pengembangan kapasitas SDM yang menjadi faktor kunci dalam menjamin keberhasilan pengelolaan BUMDes. Olehkaren aitu, diperlukan program pengembangan kapasitas yang sistematis dan berkesinambungan, meliputi pelatihan teknis dan non teknis seperti manajemen usaha, administrasi dan keuangan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan pengurus BUMDes sehingga dapat mereka dapat mampu mengelola potensi desa secara optimal dan adaptif terhadap dinamika lingkungan usaha.
3. Sebaiknya BUMDes Cijeungjing Berdikari lebih meningkatkan sinergi dan kolaborasi kemitraan. Penguatan jejaring dan kemitraan menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing BUMDes. Kolaborasi yang terjalin diharapkan mampu membuka akses terhadap pendanaan, transfer teknologi, pendampingan manajerial serta peluang besar yang lebih luas.

Daftar Pustaka

Terry, G.R. (2017). Prinsip-Prinsip Manajemen.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015.

***PENGELOLAAN BUMDES “CIJEUNGJING BERDIKARI”
SEBAGAI PENGGERAK PEREKONOMIAN DESA***

Sururama, R. & Masdar, A.A. (2020). Media Birokrasi, 2(1).

Kartika, N.K.D.C., Sinarwati, N.K., & Wahyuni, M.A. (2017). Jurnal S1 Akuntansi.

Pakamundi, M.R. (2022). Jurnal Pembangunan Daerah.

Ekson Kaka. (2022). Skripsi Ilmu Pemerintahan UMM Mataram.